

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham menurut Gapensi, (1996) dalam Wahidahwati (2002). Namun pihak manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut, sehingga timbullah konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Konflik tersebut dapat diminimumkan dengan adanya suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan terkait tersebut dengan menggunakan *good corporate governance*. La Porta et al (1999) dalam Sylvia dan Yanivi, (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Agency Theory* (teori keagenan) memberikan kesan bahwa *insider* perusahaan cenderung untuk mengambil alih perusahaan dengan memaksimalkan kepentingannya sendiri. Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*.

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan rentan terhadap konflik keagenan. Dengan demikian kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimkan biaya keagenan. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan dan dewan direksinya.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignmet*) berbagai kepentingan tersebut. **Pertama**, menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2002) adalah dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. **Kedua**, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd et al, (1998) dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, Bushee (1998) dalam Mas'ud dan Pratana (2003) mengatakan investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investors* yang tidak dengan mudah bisa

“dibodohi” oleh tindakan manajer. Dan ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Beberapa penelitian empiris yang dilakukan oleh Dechow et al (1996), dan Beasley (1996), dalam Pratana dan Mas’ud (2003), telah menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian lain telah membahas hubungan struktur kepemilikan perusahaan dengan penciptaan nilai yang akan berdampak pada nilai dan kinerja perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Cho, 1998; Iturriaga dan Sanz, 1998; Cole dan Mehran, 1998; Eisenberg et al, 1998; Barnhart dan Rosenstein, 1998; Fuers dan Kang, 2000) dalam Eddy dan Mas’ud (2003). Menurut Iturriaga dan Sanz (2000) dalam Mas’ud dan Eddy (2003) struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information approach*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2002), istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan *equity* tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Eddy dan Pratana (2004) yang menguji hubungan antara nilai perusahaan, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris menyimpulkan bahwa hubungan nilai perusahaan terhadap kepemilikan

manajerial merupakan hubungan yang non-linier dimana akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial pada level kepemilikan manajerial 5%, kemudian turun dengan level kepemilikan manajerial 5% dan kembali meningkat pada level diatas 25%. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian McConnel dan Servaes (1990).

Bennedsen (2002) dalam Eddy dan Mas'ud (2003) berargumen bahwa suatu perusahaan akan mempunyai dua motif untuk memiliki dewan komisaris, yaitu: (1) motif *governance* (penciptaan nilai perusahaan) dan (2) motif distributif (membatasi kepentingan *controlling owner*). Penelitian Klein (1999) dalam Eddy dan Mas'ud (2003) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kinerja perusahaan dan komposisi dewan komisaris akan tetapi penelitiannya juga menemukan adanya hubungan yang tidak sistematis jika dewan komisaris digolongkan kedalam kelompok *insiders*, *outsiders* dan *affiliates*.

Eddy & Pratana (2003) meneliti hubungan struktur kepemilikan manajerial, nilai perusahaan, dan investasi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah negatif. Wahidahwati (2003) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada kebijakan hutang perusahaan dan menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial berhubungan negatif pada kebijakan hutang perusahaan. Sementara Faizal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan dan belum dapat menekan diskresi manajerial dan

belum efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan *asset turnover* dan pengurangan beban operasi.

Eddy dan Mas'ud (2003) menguji kepemilikan manajerial, nilai perusahaan, investasi dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh hasil investasi tetapi hanya dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. Mas'ud & Pratana (2003) yang meneliti tentang analisis hubungan mekanisme *corporate governance* dan indikasi manajemen laba, menyimpulkan bahwa mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran atau jumlah dewan komisaris mampu mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham (*shareholders*), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhasil menjadi mekanisme yang mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi laba oleh manajer sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat meningkat. Sedangkan untuk ukuran dewan komisaris hasilnya kontradiktif dengan hasil pengujian hipotesis yang menghubungkan ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. Eddy & Pratana (2004) meneliti tentang *income smoothing*, *tobin's q*, *agency problem* dan kinerja perusahaan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan determinasi yang paling memotivasi praktek *income smoothing* dan paling menentukan nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk meneliti **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE)?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Membuktikan secara empirik tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE).

- b. Membuktikan secara empirik tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE).
- c. Membuktikan secara empirik tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE).

E. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan bukti secara empirik tentang adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *Return On Equity* (ROE).
- b. Bagi kalangan akademis maupun para peneliti yang berminat terhadap studi *corporate governance* dan kinerja perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.